



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT
SISTEM PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3449230 Intern 5660, (021) 3849670;
Faksimile (021) 3849670; Laman: www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-5/PB.7/2024 15 Januari 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2024 tentang Pedoman Penilaian Kinerja dan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN serta Penyampaian Daftar Tugas Utama *Mandatory* Tahun 2024 Bagi JF APK APBN dan JF PK APBN

Yth. 1. Kepala Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia
2. Kepala Biro Keuangan
pada Kementerian Negara/Lembaga (Terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan Permen PAN & RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional, kami sampaikan sebagai berikut :

1. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan ketentuan tersebut pada Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN (JF APK APBN) dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN (JF PK APBN), telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2024 tentang Pedoman Penilaian Kinerja dan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2024, sebagai berikut :
 - a. Penilaian kinerja JF dilakukan menggunakan sasaran kinerja pegawai, dimana Ditjen Perbendaharaan selaku pembina teknis, dapat menyampaikan IKI mandatory.
 - b. Angka kredit JF APK APBN dan JF PK APBN diperoleh dari konversi predikat kinerja pejabat yang bersangkutan.
 - c. Pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka perpindahan jabatan dan uji kompetensi dalam rangka promosi.
 - d. Penggunaan sistem (eJafung) dalam rangka penilaian kinerja, uji kompetensi, dan pengelolaan data JF APK APBN dan JF PK APBN (dari mulai pengangkatan sampai dengan penghentian sebagai JF).
3. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2024, bahwa dalam rangka menjaga kualitas kinerja JF APK APBN dan JF PK APBN serta untuk mewujudkan pengelolaan keuangan APBN yang efektif dan efisien, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Instansi Pembina telah menyusun tugas utama mandatory di bidang pengelolaan keuangan APBN.
4. Sesuai dengan angka 1 s.d. 3 di atas, bersama ini kami sampaikan:
 - a. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2024 sebagai pedoman dalam penilaian kinerja dan pelaksanaan uji kompetensi JF APK APBN dan JF PK APBN.

- b. daftar tugas utama *mandatory* sebagai Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2024 bagi pejabat fungsional APK APBN dan pejabat fungsional PK APBN (daftar IKI dapat diakses pada https://bit.ly/IKI_Mandatory_JFPKAPBN_JFAPKAPBN_2024).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih

Direktur,



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro



Lampiran Surat Direktur Sistem Perbendaharaan
Nomor : S-5/PB.7/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

Yth Para Kepala Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia dan Kepala Biro Keuangan pada
Kementerian Negara/Lembaga:

No	Kementerian Negara/Lembaga	
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
4	005	MAHKAMAH AGUNG
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
8	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN
9	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
10	015	KEMENTERIAN KEUANGAN
11	018	KEMENTERIAN PERTANIAN
12	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
13	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
14	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
15	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
17	025	KEMENTERIAN AGAMA
18	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
19	027	KEMENTERIAN SOSIAL
20	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
21	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
22	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
23	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
24	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
25	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
26	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
27	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
28	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
29	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
30	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
31	050	BADAN INTELIJEN NEGARA
32	051	LEMBAGA SANDI NEGARA



33	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL
34	054	BADAN PUSAT STATISTIK
35	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
36	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
37	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
38	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
39	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
40	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
41	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
42	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL
43	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
44	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
45	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
46	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
47	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM
48	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI
49	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
50	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
51	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL
52	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
53	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
54	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
55	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
56	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
57	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
58	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
59	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
60	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
61	100	KOMISI YUDISIAL RI
62	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
63	104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)
64	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
65	107	BADAN SAR NASIONAL
66	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
67	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
68	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
69	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
70	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
71	114	SEKRETARIAT KABINET
72	115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
73	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

74	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
75	119	BADAN KEAMANAN LAUT
76	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
77	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
78	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
79	124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
80	125	BADAN PANGAN NASIONAL
81	126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA